

ROADMAP KEUANGAN BERKELANJUTAN TAHAP II (2021 – 2025)

Sustainable Finance Roadmap Phase II (2021 - 2025)

THE FUTURE OF FINANCE

Jika Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025) Diimplementasikan dengan Baik, Maka....

J a l a l

Disampaikan pada diskusi “Kajian Evaluasi Pelaksanaan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Otoritas Jasa Keuangan”

Jakarta, 1 Juli 2021

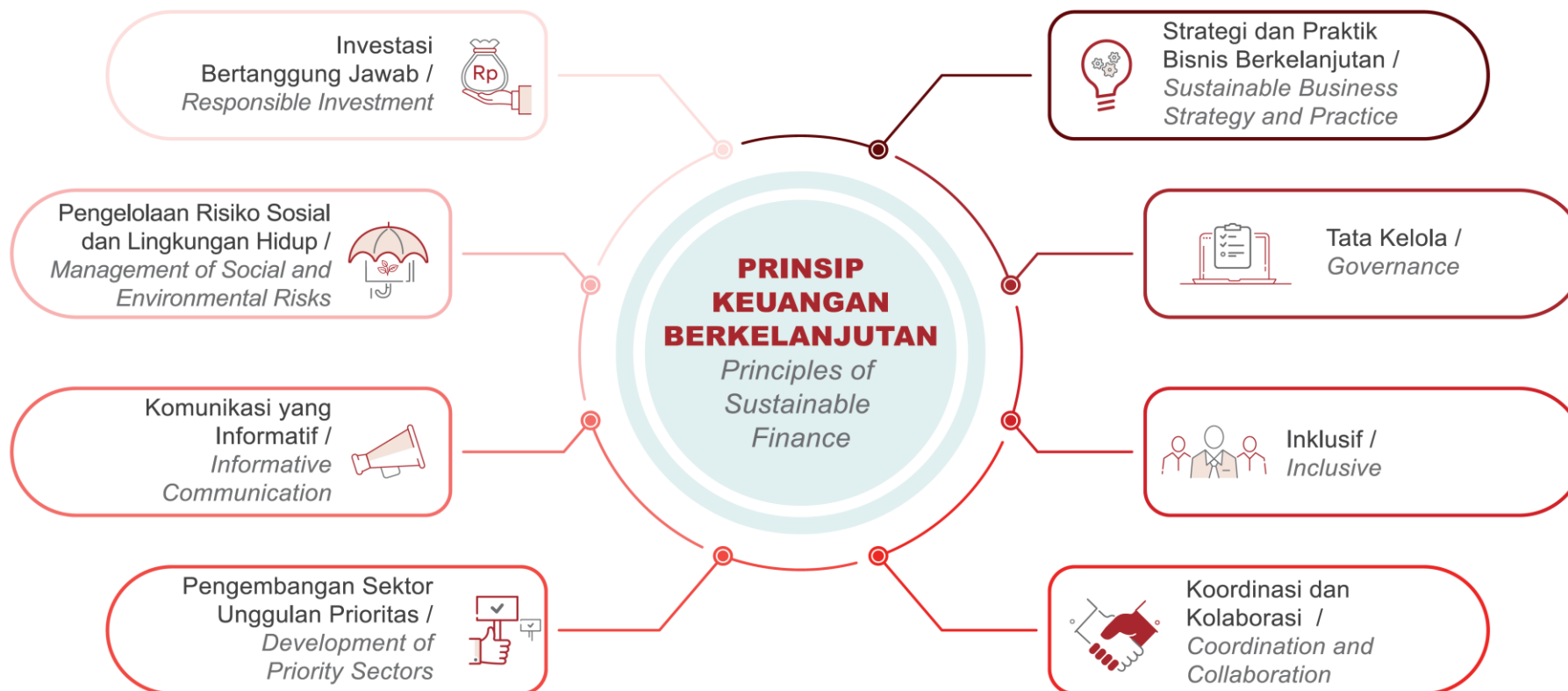


Kesadaran, Celah dan Kebutuhan Transisi (OJK, 2021)

- Ringkasan ini dipaparkan pada bagian ringkasan eksekutif.
- Celah yang disebutkan penting untuk dikritisi: (1) Apakah benar 6 tahun setelah Roadmap Tahap I dan 4 tahun POJK pemahaman industri tetap rendah? Mengapa? (2) Apakah standar hijau seperti dalam PROPER atau ecolabel tidak dianggap memadai? Apakah benar satu standar hijau itu dibutuhkan dan dimungkinkan untuk beragam sektor? (3) Mengapa peluang besar belum dimanfaatkan? (4) Mengapa risiko LST belum diintegrasikan oleh lembaga jasa Keuangan? (5) Mengapa koordinasi K/L dalam Keuangan berkelanjutan masih menjadi salah satu celah?



Prinsip Keuangan Berkelanjutan (OJK, 2021)



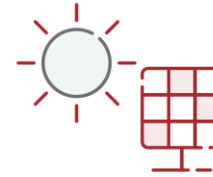
Enam tahun setelah Roadmap Tahap I dijalankan, agaknya penting untuk membuat penilaian kemajuan yang ditunjukkan di dalam setiap prinsip. Apakah Lembaga jasa keuangan, khususnya bank, telah melakukan investasinya secara bertanggung jawab? Apakah pengelolaan risiko sosial dan lingkungan yang memadai telah menjadi bagian integral dari manajemen risiko yang efektif? Dan seterusnya.

Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (OJK, 2021)

- Kategori kegiatan usaha berkelanjutan yang disebutkan tetap didominasi usaha yang terkait lingkungan.
- Bagaimana dengan bisnis yang mengentaskan kelompok miskin (SDG1), pertanian dan pangan (SDG2), Kesehatan (SDG3), Pendidikan (SDG4) dan beragam bisnis yang memecahkan isu-isu sosial di Indonesia?
- Apakah tidak lebih baik menyatakan secara eksplisit dukungan terhadap bisnis restorasi alam dan ekonomi sirkular yang ditengarai akan makin penting?
- Bagaimana sikap terhadap pertambangan yang mineral dan logamnya dibutuhkan untuk transisi keberlanjutan, terutama energi terbarukan?



Energi Terbarukan /
Renewable Energy



Efisiensi Energi /
Energy Efficiency



Pencegahan dan
Pengendalian Polusi /
*Pollution Prevention and
Control*



Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lahan yang Berkelanjutan /
*Sustainable Natural Resources and
Land Use*



Konservasi Keanekaragaman
Hayati Darat dan Air /
*Terrestrial and Aquatic
Biodiversity Conservation*



Transportasi Ramah
Lingkungan /
*Sustainable
Transportation*



Pengelolaan Air dan Air
Limbah yang Berkelanjutan /
*Sustainable Water and
Wastewater Management*



Adaptasi Perubahan Iklim /
Climate Change Adaptation



Produk Ramah Lingkungan /
Eco-efficient Products



Bangunan Berwawasan
Lingkungan /
Green Building



Kegiatan Usaha yang Berwawasan
Lingkungan Lainnya /
*Other Environmentally Friendly
Business Activities*



Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) /
*Micro, Small, and Medium
Enterprises (MSMEs)*

Ancaman dan Peluang Keuangan Berkelanjutan

(OJK, 2021)

Penerapan keuangan berkelanjutan merupakan suatu program besar dan memerlukan langkah-langkah yang tertata dengan baik. Kelalaian dalam melakukan pertumbuhan yang bertanggung jawab akan menimbulkan biaya yang besar. Penelitian dari University of California, Berkeley menyatakan bahwa apabila perubahan iklim tidak dimitigasi dengan baik dapat menyebabkan penurunan PDB sebesar 23% di tahun 2100.⁹

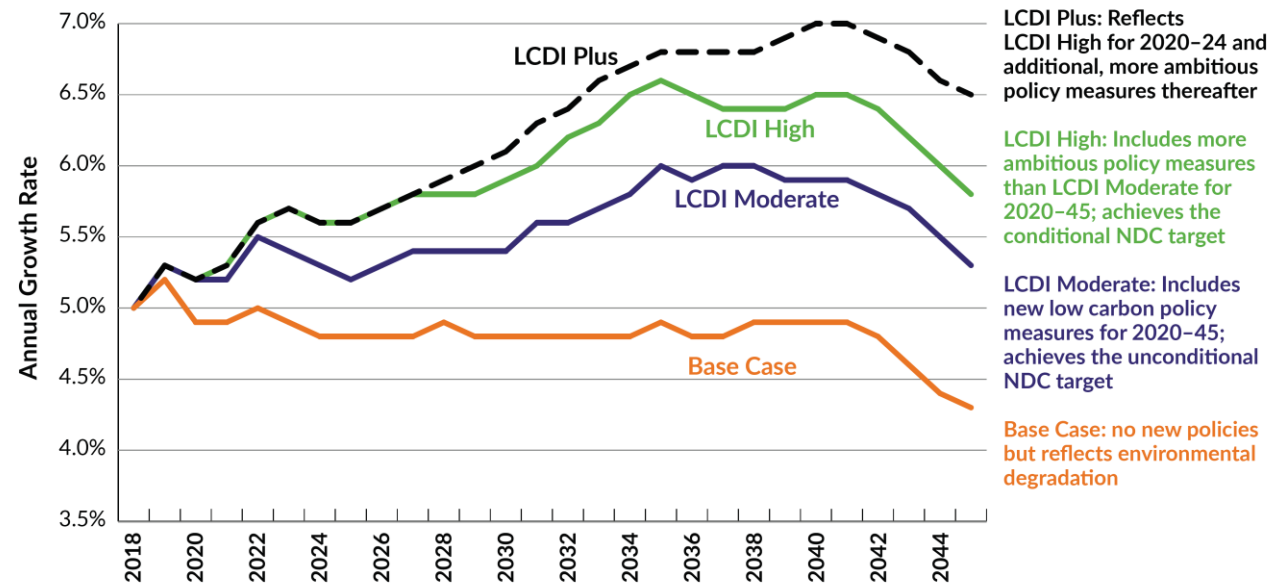
Data Bappenas menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan pembiayaan/ investasi di sektor berkelanjutan hingga 2030 sebesar Rp67.803 triliun. Hal ini merupakan peluang bagi industri jasa keuangan untuk terlibat dalam pendanaan berkelanjutan. Industri jasa keuangan juga dapat memanfaatkan perubahan kecenderungan global dalam berinvestasi. Semakin banyak investor yang mensyaratkan penanaman investasinya pada produk hijau.

Data yang ditunjukkan pada sisi ancaman berasal dari publikasi yang sudah cukup lama, dari tahun 2015, dan tidak jelas dalam menempatkan Indonesia di dalamnya. Hal ini membuat ketidakjelasan ancaman atas Indonesia. Di sisi peluang, besaran kebutuhan pembiayaan sangatlah besar—secara rerata menjadi 6.780 triliun per tahun, atau 44% dari GDP tahun 2020—namun angka ini tidak disertai dengan berapa yang dibutuhkan di setiap jenis usaha berkelanjutan, dan dari mana saja pemenuhannya yang paling mungkin.

Low Carbon Development Indonesia

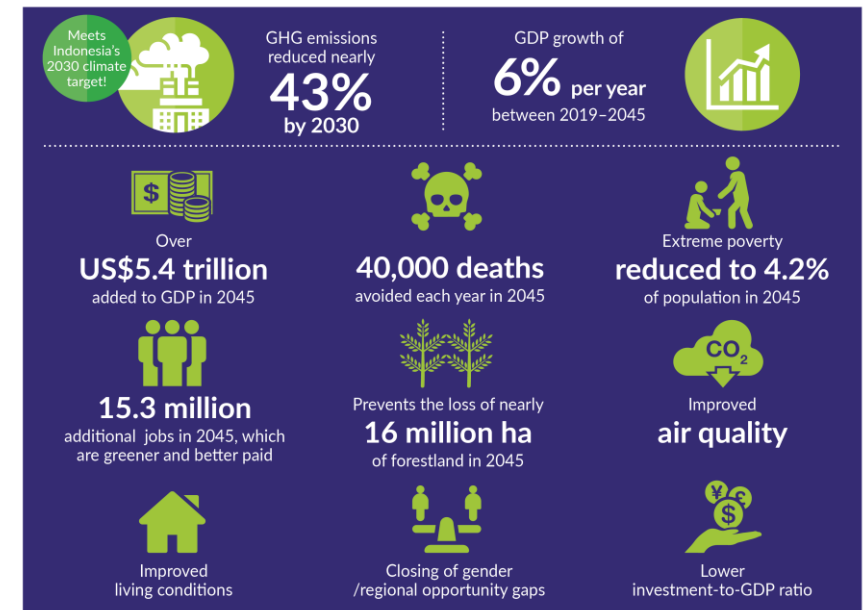
(Bappenas, 2019)

GDP Growth Trajectories for Scenarios Modeled for This Report (2018–2045)



Source: BAPPENAS Environment Directorate, based on results from Indonesia Vision 2045 Model –IV2045.

Paradigm Change: The benefits of Indonesia's New Low Carbon Growth Path (LCDI High Scenario compared with Base Case)



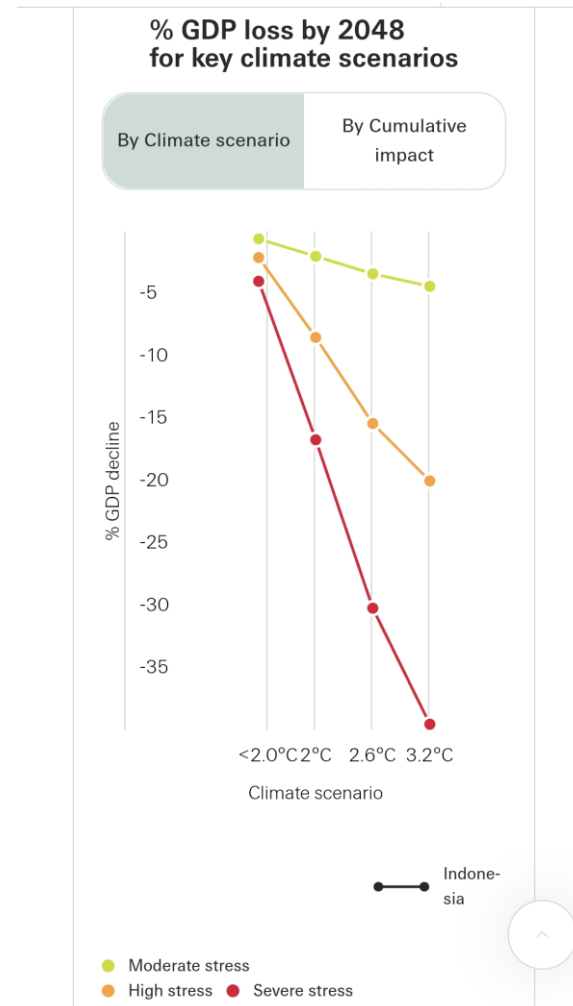
Source: Bappenas analysis.

Bappenas memiliki dokumen yang apabila ditampilkan akan bisa menunjukkan ancaman dan peluang dari keberlanjutan yang bisa diterjemahkan untuk sektor keuangan. Semakin tinggi ambisi keberlanjutan Indonesia, makin tinggi pula potensi pertumbuhan ekonominya, dengan beragam manfaat lain.

Ancaman untuk Indonesia

(Swiss Re Institute, 2021)

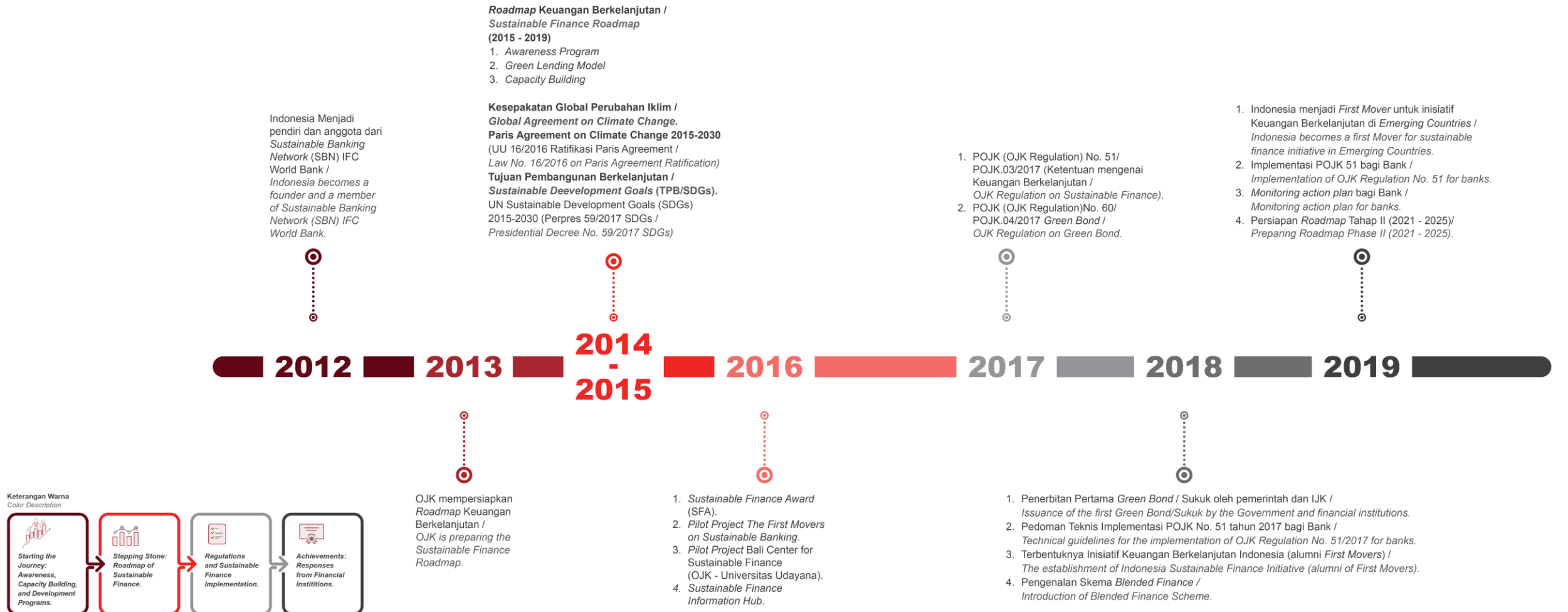
Riset Swiss Re Institute memberikan gambaran yang lebih muram hingga tahun 2050. Dunia akan kehilangan 18% GDP bila BAU, dan 4% GDP bila Persetujuan Paris tercapai. Indonesia adalah negara paling rentan, yang akan kehilangan 40% GDP bila BAU, dan kehilangan 5% bila Persetujuan Paris tercapai.



Climate Economics Index: mid-of-century

Rank	Country	Physical risk (70%)			Current adaptive capacity (30%)	Climate Economics Index
		Chronic risk (GDP impact) (30%)	Acute risk (extreme weather risk)			
			Dry climate risk score (20%)	Wet climate risk score (20%)		
1	Finland	3	8	32	8	11.3
2	Switzerland	4	12	37	2	11.6
3	Austria	7	15	41	6	15.1
4	Portugal	9	21	30	10	15.9
5	Canada	12	18	20	16	16.0
6	Norway	6	29	34	10	17.4
7	US	13	34	12	16	17.9
8	Sweden	10	28	36	7	17.9
9	Denmark	1	40	48	3	18.8
10	Germany	17	25	45	1	19.4
11	Japan	22	35	16	9	19.5
12	Spain	14	17	31	19	19.5
13	Greece	28	3	25	21	20.3
14	Australia	33	16	17	13	20.4
15	UK	11	36	47	4	21.1
16	Turkey	15	4	26	36	21.3
17	Netherlands	5	26	46	18	21.3
18	New Zealand	29	2	27	24	21.7
19	Italy	31	7	33	15	21.8
20	Korea	24	30	14	20	22.0
21	Hungary	19	9	39	23	22.2
22	UAE	21	5	35	27	22.4
23	Hong Kong	41	6	1	29	22.4
24	Romania	8	27	42	21	22.5
25	Belgium	35	39	2	13	22.6
26	Ukraine	2	10	38	42	22.8
27	France	26	19	40	12	23.2
28	Argentina	20	22	10	37	23.5
29	Mexico	25	20	15	31	23.8
30	Egypt	23	11	3	47	23.8
31	Russia	27	13	28	32	25.9
32	Poland	16	24	44	25	25.9
33	Czech	18	23	43	26	26.4
34	Saudi Arabia	43	14	4	38	27.9
35	South Africa	37	1	18	45	28.4
36	Chile	39	31	9	30	28.7
37	Taiwan	40	41	6	28	29.8
38	Brazil	34	42	8	33	30.1
39	Singapore	47	44	29	5	30.2
40	Peru	30	46	7	41	31.9
41	China	38	33	21	35	32.7
42	Colombia	36	38	22	40	34.8
43	Venezuela	32	32	24	48	35.2
44	Thailand	45	43	11	39	36.0
45	India	42	37	13	46	36.4
46	Philippines	46	48	5	43	37.3
47	Malaysia	48	47	23	33	38.3
48	Indonesia	44	45	19	44	39.2

Capaian Keuangan Berkelanjutan Hingga 2019 (OJK, 2021)



Produk Keuangan Berkelanjutan dan Jumlahnya Hingga September 2020 (OJK, 2021)

Portofolio Hijau (<i>Green Loans</i>)*	Rp809,75 Triliun** / USD55,8 Miliar (IDR809.75 Trillion / USD55.8 Billion)
<i>Global Sustainability Bond</i>	Rp7,9 Triliun (IDR7.9 Trillion)
<i>Green and Gender Bond</i>	Rp59,9 Triliun (IDR59.9 Trillion)
Pembiayaan Campuran (<i>Blended Finance</i>)	Rp35,6 Triliun (IDR35.6 Trillion)
TOTAL	Rp913,15 Triliun (IDR913.15 Trillion)

* Berdasarkan data RAKB dan hasil survei bulan November 2020.

** Kurs Oktober 2018 (14.480)

Beragam produk keuangan berkelanjutan yang disebutkan ini apakah juga mencakup beragam obligasi dan sukuk yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI? Kemudian, apakah pemanfaatan dana tersebut benar-benar sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam rencana? Seperti apakah dampak yang ditimbulkan oleh pemanfaatan dana tersebut? Di mana penilaian dampak dari pemanfaatannya bisa diakses oleh masyarakat luas? Mengingat *greenwashing* adalah salah satu tantangan terpenting dalam keuangan berkelanjutan, mekanisme akuntabilitas atas pemanfaatan dana tersebut sangat penting untuk diperhatikan.

Detail Pengembangan Keuangan Berkelanjutan 2021–2025 (OJK, 2021)

- Beberapa kebijakan direncanakan akan dibuat dalam waktu yang rasanya terlalu lama, mis. integrasi LST dan KPI (2021-2023) serta pengembangan insentif (2021-2025) yang dapat membuat waktu penerapannya lebih lama lagi.
- Sebagai inti peta jalan, bagian ini seharusnya menyertakan target-target yang jelas untuk melengkapi detail kegiatannya, sehingga kelak pencapaiannya bisa diukur.
- Bagian produk, contohnya, sangat penting menyertakan target besaran dana keuangan berkelanjutan untuk setiap jenis produknya, mis. obligasi berkelanjutan, sukuk hijau, obligasi sosial.
- Kurang jelas bagaimana hubungan yang diharapkan dengan pemangku kepentingan luar negeri, seperti para investor dampak (*impact investor*), yang memiliki peran besar Dalam pengembangan keuangan berkelanjutan.
- Sangat penting untuk menjelaskan bagaimana setiap kegiatan berkontribusi pada pencapaian target yang lebih jauh, yaitu SDGs dan Persetujuan Paris—dengan membuat *theory of change*.

KEBIJAKAN / POLICIES

- *Green Taxonomy* (2021 - 2022)
- Integrasi Aspek LST / *ESG Integration* (2021 - 2023)
- *Key Performance Indicator (KPI)* (2021 - 2023)
- Pengembangan Insentif / *Developing Incentives* (2021 - 2025)
- Panduan Implementasi Keuangan Berkelanjutan di Pasar Modal dan IKNB / *Guidance of Sustainable Finance Implementation in the Capital Market and NBFI* (2021 - 2022)

INFRASTRUKTUR PASAR / MARKET INFRASTRUCTURE

- Pengembangan *Sustainable Finance Information Hub (SFIH)* / *Development of Sustainable Finance Information Hub* (2021 - 2025)
- Pengembangan *primary dan secondary market* / *Development of primary and secondary market* (2022 - 2025)

DUKUNGAN NON PEMERINTAH / NON-GOVERNMENT SUPPORT

- Pengembangan Pusat Riset / *Developing Research Centers* (2022 - 2025)
- Realisasi Program Riil / *Real Programs* (2021 - 2025)

AWARENESS

- Buku Acuan Kredit/ Pembiayaan/ Investasi Sektor / *Guide Book of Credit/Financing/ Investment in Sectors* (2021 - 2025)
- *National Campaign - Indonesia Sustainability Week* (2021 - 2024)
- Program Inklusi Keuangan Berkelanjutan / *Sustainable Finance Inclusion Program* (2022 - 2025)
- *Sustainable Finance Award (SFA)* (2024 - 2025)
- Publikasi Informatif untuk Investor Baru / *Informative Publications for New Investors* (2022 - 2025)

PRODUK / PRODUCT

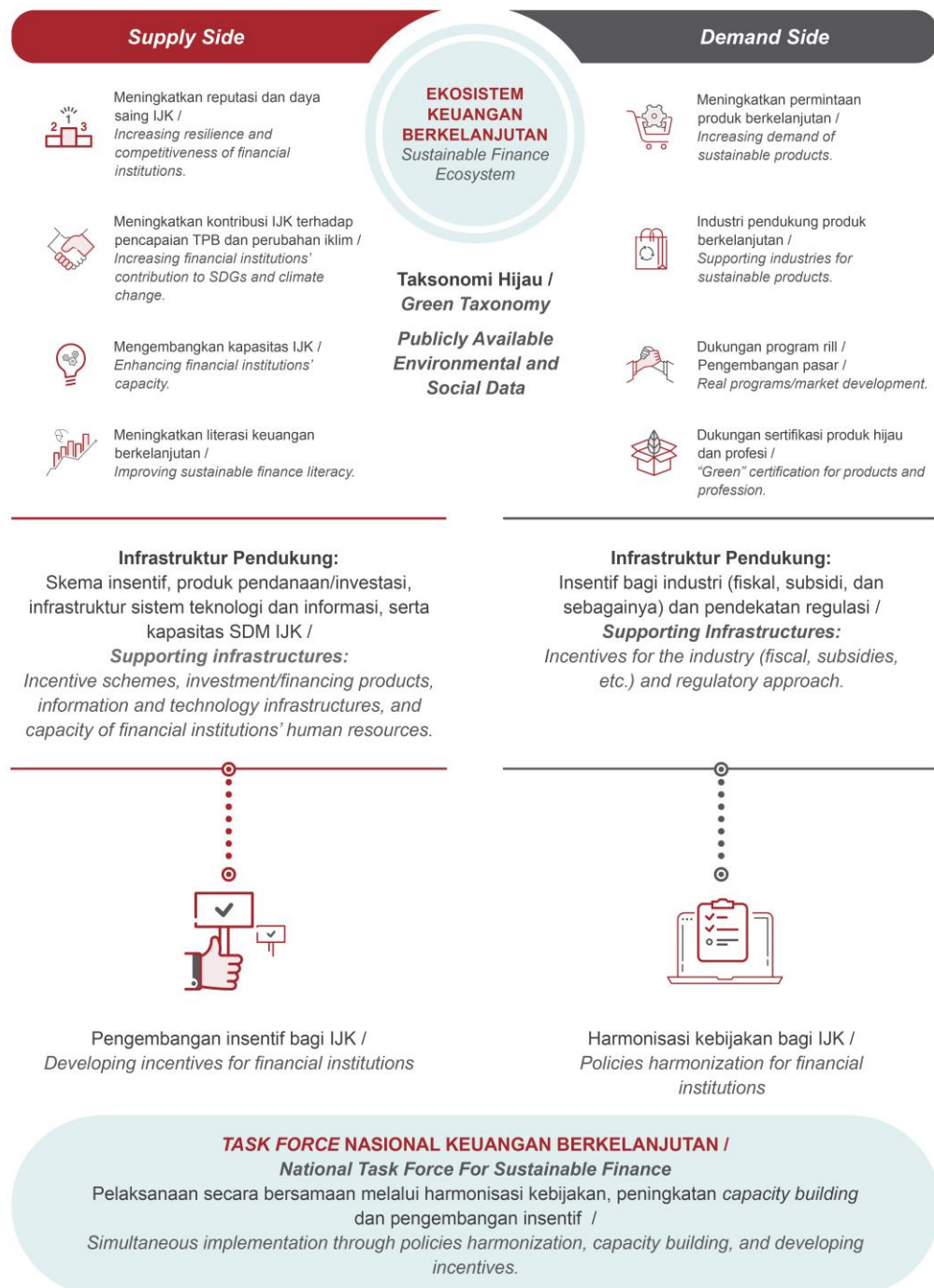
- Pengembangan Infrastruktur Penunjang / *Developing Supporting Infrastructure* (2021 - 2025)
- Pengembangan Inovasi Produk / *Product Innovation* (2021 - 2025)

KOORDINASI K/L / COORDINATION AMONG MINISTRIES/INSTITUTIONS

- *Task Force Nasional / National Task Force* (2021 - 2025)
- Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keuangan Berkelanjutan / *Monitoring and Evaluation of the Implementation of Sustainable Finance* (2021 - 2025)

SDM / HUMAN RESOURCES

- *Training Keuangan Berkelanjutan (TKB) dan Training of Trainers (TOT) / Sustainable Finance Training and Training of Trainers* (2021 - 2025)
- *E-learning* (2024 - 2025)



Keseimbangan Sisi Penawaran dan Permintaan (OJK, 2021)

“... di sisi penawaran, OJK akan mengembangkan infrastruktur pendukung, antara lain pengembangan produk dan skema inovatif pembiayaan, pengembangan infrastruktur teknologi dan informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia industri keuangan, dan pengembangan skema insentif prudensial dan non-prudensial. Pengembangan hal-hal tersebut memerlukan dukungan taksonomi hijau, ketersediaan data, dan **kolaborasi di tingkat nasional antara kementerian dan lembaga serta koordinasi dengan lembaga multilateral** (Gambar 7)....” Apakah yang ditebalkan merupakan tupoksi Task Force Nasional Keuangan Berkelanjutan?

Apakah memang keuangan berkelanjutan hanya membutuhkan taksonomi hijau (dengan konotasi lingkungan) sebagaimana di Eropa? EU membuat taksonomi hijau (mitigasi, adaptasi, ekonomi sirkular, polusi, air, dan keanekaragaman hayati) dalam konteks European Green Deal. Kalau hendak berkontribusi kepada 17 Tujuan SDGs, tidakkah juga membutuhkan taksonomi untuk dukungan pada aspek sosial (SDG1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 16), aspek ekonomi (SDG8, 9, 10, 12), selain lingkungan (SDG6, 13, 14, 15)? Sementara SDG17 dapat diwujudkan melalui Task Force Nasional Keuangan Berkelanjutan.

Risiko Terkait Perubahan Iklim dan Dampak Finansial (OJK, 2021)

Penjelasan tentang risiko terkait perubahan iklim ini dikaitkan dengan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Transisi (yang adil) atau *just transition*, tersebut sesungguhnya tak bisa dipahami dalam jangka pendek (hingga 2025), melainkan setidaknya hingga 2050, sebagaimana kurun waktu pencapaian Persetujuan Paris, dengan tujuan antara di tahun 2030. Diperlukan kejelasan yang lebih dalam tentang hal ini, seperti asumsi skenario ekonomi rendah karbon (LCDI) yang dipergunakan, serta target waktu *Net Zero Emissions* (NZE) yang disetorkan Indonesia sebagai bagian komitmen Persetujuan Paris. Juga, diperlukan diskusi yang lebih baik—dengan perhitungan risiko yang kuantitatif—termasuk risiko aset terdampar (*stranded assets*) yang tak disebutkan di dalam teks maupun bagan.



Potensi Dampak Finansial / *Potential Financial Impacts*



Prioritas Pengembangan Roadmap Tahap II (OJK, 2021)

1. **Pengembangan taksonomi hijau** yang bertujuan mengklasifikasikan aktivitas pembiayaan dan investasi berkelanjutan di Indonesia.¹⁶ Klasifikasi ini menjadi dasar bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia dalam aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Penyusunan taksonomi hijau tersebut dilakukan melalui pembentukan *task force* nasional keuangan berkelanjutan, yang melibatkan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait. Taksonomi yang dikembangkan akan mengakomodasi keseluruhan pedoman yang ada saat ini terkait sektor hijau.
2. **Implementasi aspek LST** ke dalam manajemen risiko dengan tujuan meningkatkan daya tahan serta mitigasi risiko lingkungan dan sosial yang dapat mempengaruhi proses bisnis industri keuangan. Upaya ini dilakukan melalui pelaporan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, pengembangan *key performance indicators* serta didukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara menyeluruh.
3. **Pengembangan program riil** dimaksudkan untuk memberikan contoh sukses pengembangan inovatif skema hijau sehingga meningkatkan peran industri keuangan dalam pembiayaan berkelanjutan. Pelaksanaan program riil dilakukan melalui kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait serta pemangku kepentingan lainnya. Upaya ini sejalan dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan pemerintah serta menjadi dasar pengembangan skema pembiayaan hijau.

Walaupun dinyatakan ada tujuh komponen pendukung ekosistem Keuangan berkelanjutan, pada bagian akhir *Roadmap* dinyatakan bahwa hingga 2025 pengembangan taksonomi hijau, implementasi LST ke dalam manajemen risiko, serta pengembangan program riil adalah prioritasnya. Tidak jelas benar bagaimana perwujudan dari prioritisasi ketiga komponen itu dibandingkan yang lain, karena tak ada diskusi memadai soal alasan di balik prioritisasi, juga tak ada target yang dinyatakan dengan jelas.

Yang juga belum didiskusikan dengan jelas adalah apa yang bakal terjadi dengan lembaga jasa keuangan non-bank, termasuk asuransi, manajemen asset, *fintech*, dan pasar modal, yang memegang peranan sangat penting dalam keuangan berkelanjutan. Apakah ketiga komponen prioritas ini, juga empat yang lain, mencakup lembaga-lembaga jasa Keuangan tersebut?

Harapan Presiden Joko Widodo

- Harapan ini disematkan sebagai pembuka bab 3: detail pengembangan keuangan berkelanjutan.
- Undangan untuk investasi di energi bersih juga memerlukan kebijakan lain: sinyal divestasi yang tegas dari energi kotor.
- Undangan atas investasi yang bertanggung jawab (Prinsip 1) atau investasi berkelanjutan memerlukan kebijakan yang tegas untuk dalam transisi menuju pencapaian SDGs 2030 dan Persetujuan Paris 2050.
- *Mixed signals* akan membuat investor berkelanjutan (termasuk energi bersih) ragu-ragu untuk masuk ke Indonesia.



“ Saya berharap dapat menyambut Anda di Indonesia untuk berinvestasi di masa depan di mana energi terbarukan dan teknologi bersih menciptakan kehidupan berkelanjutan, ”
(Presiden Joko Widodo dalam Abu Dhabi Sustainability Week, 13 Januari 2020)

Contoh *Mixed Messages* yang Dapat Mengancam Investasi Berkelanjutan

(Carbon Tracker, 2021; The Guardian, 2021)



Five Asian countries account for 80% of new coal power investment

China, India, Indonesia, Japan and Vietnam plan to build more than 600 coal power units

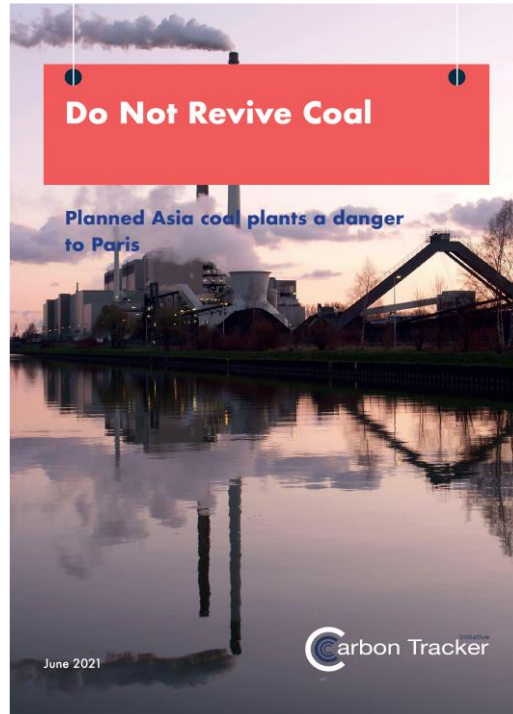
Jillian Ambrose

06:01 Wed June 30, 2021

Follow Jillian Ambrose

Five Asian countries are jeopardising global climate ambitions by investing in 80% of the world's planned new coal plants, according to a report.

Carbon Tracker, a financial thinktank, has found that China, India, Indonesia, Japan and Vietnam plan to build more than 600 coal power units, even though renewable energy is cheaper than most new coal plants.



Country	Total GW planned	Average size of project MW	Average capex per project \$m	WACC	Interest rate on debt	Tax rate
Japan	8.5	608	1,614	2.6%	0.9%	31%
Indonesia	23.6	220	379	9.8%	3.5%	22%
India	59.8	650	981	7.2%	1.5%	30%
Vietnam	23.8	579	927	5.1%	1.5%	20%
China	187.1	508	195	4.5%	2.0%	25%

Mengundang investasi energi bersih namun diketahui masih melanjutkan investasi dalam proyek pembangkit listrik tenaga batubara dipastikan membuat investor ragu-ragu untuk masuk ke Indonesia. Juga, investasi dalam kendaraan listrik akan sangat sulit masuk tanpa kejelasan *phase out* dari kendaraan berbasis teknologi *internal combustion engine*.

Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Diperlukan kejelasan lebih lanjut untuk bisa membuat Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) ini dapat diimplementasikan dengan baik.
2. Di antara yang terpenting untuk dijelaskan adalah: (1) kinerja penegakan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan pada periode sebelumnya, (2) ancaman dan peluang keuangan berkelanjutan di Indonesia, (3) kinerja pemanfaatan produk-produk keuangan berkelanjutan, (4) detail kegiatan dan target keuangan berkelanjutan 2021-2025 dengan *theory of change*-nya, (5) kejelasan tentang peran aspek ekonomi dan sosial dalam keuangan berkelanjutan, serta (6) sikap tegas meninggalkan secara bertahap pembiayaan aktivitas bisnis yang bertentangan dengan tujuan keberlanjutan yang diwujudkan dalam transisi yang adil.
3. OJK perlu membuat rencana jangka panjang keuangan berkelanjutan yang memiliki perspektif lebih jauh, yaitu hingga 2030 (SDGs dan tujuan antara Persetujuan Paris) dan 2050 (tujuan Persetujuan Paris), sehingga bisa diperlihatkan bagaimana Roadmap 2021-2025 memang sesuai dengan trajektori pembangunan berkelanjutan Indonesia.
4. OJK perlu memanfaatkan RAN SDGs dan LCDI dari Bappenas dengan LTS-LCCR2050 dari KLHK untuk bisa membuat perencanaan berjangka lebih panjang tersebut.
5. OJK perlu benar-benar meluaskan cakupan kategori usaha berkelanjutan, sehingga bisa mencakup seluruh usaha yang kompatibel dengan SDGs, termasuk dalam aspek ekonomi dan sosial. OJK juga perlu membuat kategori usaha yang tidak berkelanjutan, dengan target pembiayaan serta *phase out* yang jelas. Hanya dengan penggabungan keduanya saja OJK bisa memberikan pesan yang konsisten terhadap seluruh pemangku kepentingan nasional maupun global tentang transisi yang adil dan peran industri Keuangan di dalamnya.

Jalal

Chairperson of Advisory Board - Social Investment Indonesia

jalal.csri@yahoo.com

+62-811-8814488

